



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Ktut Hadi Priatna

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Susiwijono

Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian

Pihak Pertama,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Susiwijono

I Ktut Hadi Priatna

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Terimplementasinya birokrasi yang berkualitas di bidang Hukum dan Organisasi	1.1	Kualitas Rencana aksi pembangunan RB General	2,55
		1.2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General	100%
		1.3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	100%
		1.4	Tingkat Capaian Sistem Kerja	5
		1.5	Indeks Reformasi Hukum	90
2	Terwujudnya dukungan koordinasi Cipta Kerja yang efektif	2.1	Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut terkait Undang-Undang Cipta Kerja	100%
3	Terwujudnya penelaahan dan perumusan hukum serta analisis organisasi dan tata laksana yang berkualitas	3.1	Persentase Penyelesaian Dokumen Perumusan Produk Hukum	100%
		3.2	Persentase Penyelesaian Dokumen Advokasi Hukum	100%
		3.3	Persentase Penyelesaian Instrumen Penataan Organisasi	100%
		3.4	Persentase Penyelesaian Instrumen Penataan Tata Laksana	100%
		3.5	Persentase Penyelesaian Dokumen Reformasi Birokrasi Tematik	100%
		3.6	Persentase Penyelesaian Dokumen Reformasi Birokrasi General	100%
4	Terwujudnya layanan Hukum dan Organisasi dalam dukungan manajemen yang berkualitas	4.1	Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi	3 dari 4
5	Terwujudnya tata kelola Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang baik	5.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi	100%

Kegiatan

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Anggaran

Rp. 2.206.300.000,-
Rp. 3.148.053.000,-

Rp 5.354.353.000,-

Total

(Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Pihak Kedua,

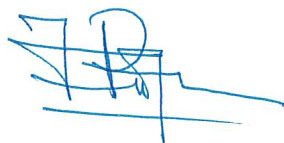
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pihak Pertama,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Susiwijono



I Ktut Hadi Priatna

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Terimplementasinya Birokrasi yang berkualitas di bidang Hukum dan Organisasi	1. Kualitas Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) General	2,55	Koordinasi penyusunan rencana aksi RB General	<ul style="list-style-type: none"> Rapat tindak lanjut evaluasi RB tahun 2025 dan koordinasi pelaksanaan RB Tahun 2026 Penyusunan Persesmenko rencana aksi RB Kemenko Perekonomian Tahun 2026 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan penyesuaian rencana aksi 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan penyesuaian rencana aksi 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan penyesuaian rencana aksi
		2. Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	100%	Koordinasi pelaksanaan rencana aksi RB General	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan dan/atau asistensi pelaksanaan rencana aksi RB General 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi bukti dukung rencana aksi RB General triwulan I Pendampingan dan/atau asistensi pelaksanaan rencana aksi RB General 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi bukti dukung rencana aksi RB General triwulan II Pendampingan dan/atau asistensi pelaksanaan rencana aksi RB General 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi bukti dukung rencana aksi RB General triwulan III dan IV Pendampingan dan/atau asistensi pelaksanaan rencana aksi RB General Pelaporan pelaksanaan RB Tahun 2026
		3. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	100%	Koordinasi penilaian implementasi penyederhanaan struktur organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan dokumen penilaian mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan dokumen penilaian mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan penilaian mandiri penyederhanaan struktur organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan pelaporan
		4. Tingkat Capaian Sistem Kerja	5	Koordinasi implementasi kebijakan sistem kerja atas penyederhanaan struktur organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan dokumen penilaian mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan dokumen penilaian mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan penilaian mandiri implementasi kebijakan sistem kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan pelaporan
		5. Indeks Reformasi Hukum	90	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil evaluasi penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 Koordinasi penyelenggaraan penilaian IRH 	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi dan dokumentasi bukti dukung IRH Tahun 2026 Triwulan I Pembentukan tim penilaian IRH Tahun 2025 Pendampingan pemeriksaan kelengkapan pemenuhan bukti dukung IRH Tahun 2025 	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi dan dokumentasi bukti dukung IRH Tahun 2026 Triwulan II Pemenuhan bukti dukung penilaian IRH Tahun 2025 Rapat pembahasan hasil verifikasi bukti dukung penilaian IRH Tahun 2025 	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi dan dokumentasi bukti dukung IRH Tahun 2026 Triwulan III Rapat finalisasi penilaian IRH Tahun 2025 Submit bukti dukung IRH Tahun 2025 dan pengunggahan berita acara pada portal IRH 	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi dan dokumentasi bukti dukung IRH Tahun 2026 Triwulan IV Evaluasi penilaian IRH Tahun 2025

2	Terwujudnya Dukungan Koordinasi Cipta Kerja yang Efektif	1.Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut terkait Undang-Undang Cipta Kerja	100%	Koordinasi penyusunan peraturan turunan dan penanganan perkara pengujian	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyusunan rencana kerja, melalui rapat koordinasi antar K/L yang terlibat dalam UUCK ● Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan pelaksanaan ● Pelaksanaan koordinasi penanganan perkara pengujian 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan pelaksanaan ● Pelaksanaan koordinasi penanganan perkara pengujian 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan pelaksanaan ● Pelaksanaan koordinasi penanganan perkara pengujian 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan pelaksanaan ● Pelaksanaan koordinasi penanganan perkara pengujian ● Evaluasi dan pelaporan Kegiatan
3	Terwujudnya Penelaahan dan Perumusan Hukum serta Analisis Organisasi dan Tata Laksana yang Berkualitas	1.Persentase Penyelesaian dokumen perumusan produk hukum	100%	Koordinasi pembentukan produk hukum	<p>Koordinasi pembentukan produk hukum baik yang melibatkan instansi eksternal maupun unit kerja internal, meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Permohonan izin prakarsa oleh Menko Perekonomian; 2.Pembentukan panitia antar Kementerian dan/atau antar nonkementerian (PAK); 3.Pelaksanaan rapat PAK penyusunan rancangan PUU; 4.Penandatanganan berita acara PAK penyusun rancangan PUU; 5.Permohonan Harmonisasi kepada Kementerian Hukum; 6.Penandatanganan Berita Acara Pengharmonisasian; 7.Permohonan penetapan rancangan PUU kepada Presiden; 8.Pemberian Paraf atau masukan terhadap rancangan PUU; 	<p>Koordinasi pembentukan produk hukum baik yang melibatkan instansi eksternal maupun unit kerja internal, meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Permohonan izin prakarsa oleh Menko Perekonomian; 2.Pembentukan panitia antar Kementerian dan/atau antar nonkementerian (PAK); 3.Pelaksanaan rapat PAK penyusunan rancangan PUU; 4.Penandatanganan berita acara PAK penyusun rancangan PUU; 5.Permohonan Harmonisasi kepada Kementerian Hukum; 6.Penandatanganan Berita Acara Pengharmonisasian; 7.Permohonan penetapan rancangan PUU kepada Presiden; 8.Pemberian Paraf atau masukan terhadap rancangan PUU; 	<p>Koordinasi pembentukan produk hukum baik yang melibatkan instansi eksternal maupun unit kerja internal, meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Permohonan izin prakarsa oleh Menko Perekonomia; 2.Pembentukan panitia antar Kementerian dan/atau antar nonkementerian (PAK); 3.Pelaksanaan rapat PAK penyusunan rancangan PUU; 4.Penandatanganan berita acara PAK penyusun rancangan PUU; 5.Permohonan Harmonisasi kepada Kementerian Hukum; 6.Penandatanganan Berita Acara Pengharmonisasian; 7.Permohonan penetapan rancangan PUU kepada Presiden; 8.Pemberian Paraf atau masukan terhadap rancangan PUU; 	<ul style="list-style-type: none"> ● Koordinasi pembentukan produk hukum baik yang melibatkan instansi eksternal maupun unit kerja internal, meliputi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1.Permohonan izin prakarsa oleh Menko Perekonomian; 2.Pembentukan panitia antar Kementerian dan/atau antar nonkementerian (PAK); 3.Pelaksanaan rapat PAK penyusunan rancangan PUU; 4.Penandatanganan berita acara PAK penyusun rancangan PUU; 5.Permohonan Harmonisasi kepada Kementerian Hukum; 6.Penandatanganan Berita Acara Pengharmonisasian; 7.Permohonan penetapan rancangan PUU kepada Presiden; 8.Pemberian Paraf atau masukan terhadap rancangan PUU; ● Penyusunan Laporan


		2. Persentase penyelesaian dokumen advokasi hukum	100%	Koordinasi penanganan perkara yang melibatkan Kemenko Perekonomian sebagai pihak dalam perkara	<ul style="list-style-type: none"> ● Rapat pembahasan pokok perkara ● Penyiapan berkas perkara atau dokumen yang diperlukan dalam penanganan perkara ● Menghadiri persidangan atau menyampaikan berkas perkara atau dokumen yang diperlukan kepada peradilan atau pihak yang berkepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rapat pembahasan pokok perkara ● Penyiapan berkas perkara atau dokumen yang diperlukan dalam penanganan perkara ● Menghadiri persidangan atau menyampaikan berkas perkara atau dokumen yang diperlukan kepada peradilan atau pihak yang berkepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rapat pembahasan pokok perkara ● Penyiapan berkas perkara atau dokumen yang diperlukan dalam penanganan perkara ● Menghadiri persidangan atau menyampaikan berkas perkara atau dokumen yang diperlukan kepada peradilan atau pihak yang berkepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rapat pembahasan pokok perkara ● Penyiapan berkas perkara atau dokumen yang diperlukan dalam penanganan perkara ● Menghadiri persidangan atau menyampaikan berkas perkara atau dokumen yang diperlukan kepada peradilan atau pihak yang berkepentingan ● Penyusunan Laporan
		3. Persentase penyelesaian instrumen penataan organisasi	100%	Koordinasi dan fasilitasi penyesuaian susunan organisasi dan penyusunan instrumen penataan organisasi yang efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengajuan penyesuaian susunan organisasi berdasarkan RPJMN dan Renstra Kemenko Perekonomian 2025-2029 (perubahan kedua atas Perpres 143/2024). ● Persiapan evaluasi formasi jabatan fungsional ● Penyusunan peta jabatan Tahun 2026 ● Pemenuhan Data Perencanaan Kebutuhan pada Sistem Informasi Instansi terkait (BKN dan/atau KemenPANRB) ● Monev penataan organisasi dan perencanaan kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Lanjutan pengajuan penyesuaian susunan organisasi berdasarkan RPJMN dan Renstra Kemenko Perekonomian 2025-2029 (perubahan kedua atas Perpres 143/2024). ● Penyusunan SOTK berdasarkan perubahan kedua atas Perpres 143/2024. ● Persiapan dan/atau pengajuan formasi jabatan fungsional yang belum ada dan menjadi kebutuhan organisasi ● Monev penataan organisasi dan perencanaan kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Lanjutan Penyusunan SOTK berdasarkan perubahan kedua atas Perpres 143/2024. ● Pengajuan formasi jabatan fungsional yang belum ada dan menjadi kebutuhan organisasi ● Pemenuhan Data Perencanaan Kebutuhan pada Sistem Informasi Instansi terkait (BKN dan/atau KemenPANRB) ● Penyesuaian standar kompetensi jabatan ● Monev penataan organisasi dan perencanaan kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Lanjutan Penyusunan SOTK berdasarkan perubahan kedua atas Perpres 143/2024. ● Pengajuan formasi jabatan fungsional yang belum ada dan menjadi kebutuhan organisasi ● Penyesuaian standar kompetensi jabatan ● Monev dan Pelaporan penataan organisasi dan perencanaan kebutuhan
		4. Persentase penyelesaian instrumen penataan tatalaksana	100%	Koordinasi dan fasilitasi implementasi kebijakan sistem kerja untuk penyederhanaan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> ● Persiapan penyusunan peta proses bisnis Tahun 2026 ● Koordinasi dan fasilitasi pembentukan Pokja pada unit kerja Tahun 2026 ● Persiapan pengembangan SOP ● Monev penataan tata laksana 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyusunan peta proses bisnis Tahun 2026 ● Reviu pembentukan Pokja pada unit kerja Tahun 2026 ● Pengembangan SOP ● Monev penataan tata laksana 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyusunan peta proses bisnis Tahun 2026 ● Reviu pembentukan Pokja pada unit kerja Tahun 2026 ● Pengembangan SOP ● Monev penataan tata laksana 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyusunan peta proses bisnis Tahun 2026 ● Pengembangan SOP ● Monev dan pelaporan penataan tata laksana

		5. Persentase penyelesaian dokumen RB Tematik	100%	Pemenuhan bukti dukung penyelesaian dokumen RB Tematik	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemenuhan bukti dukung rencana aksi RB Triwulan I 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemenuhan bukti dukung Rencana Aksi RB Triwulan II 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemenuhan bukti dukung Rencana Aksi RB Triwulan III 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemenuhan bukti dukung Rencana Aksi RB Triwulan IV ● Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan Rencana Aksi RB Tematik Triwulan I sampai dengan Triwulan IV
		6. Persentase penyelesaian dokumen RB <i>General</i>	100%	Pemenuhan bukti dukung penyelesaian dokumen RB <i>General</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemenuhan bukti dukung Rencana Aksi RB Triwulan I 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemenuhan bukti dukung Rencana Aksi RB Triwulan II 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemenuhan bukti dukung Rencana Aksi RB Triwulan III 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemenuhan bukti dukung Rencana Aksi RB Triwulan IV ● Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan Rencana Aksi RB <i>General</i> Triwulan I sampai dengan Triwulan IV
4	Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi dalam Dukungan Manajemen yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi	3 dari 4	Penguatan layanan hukum, layanan organisasi dan tata laksana, dan layanan pengelolaan RB	<ul style="list-style-type: none"> ● Membentuk PIC untuk masing-masing layanan yang berinteraksi langsung (pendampingan) dengan setiap unit kerja, meliputi: layanan hukum, layanan organisasi dan tata laksana, dan layanan RB ● Melakukan evaluasi atas hasil survei kepuasan layanan tahun 2025 untuk penyempurnaan tahun 2026 ● Internalisasi atas 5 aspek (<i>responsive, reliable, tangible, assured, empathetic</i>) kepada seluruh pegawai terutama PIC dalam memberikan pelayanan kepada unit kerja 	<ul style="list-style-type: none"> ● Menindaklanjuti hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan layanan Biro Hukum dan Organisasi, meliputi: layanan hukum, layanan organisasi dan tata laksana, dan layanan RB 	<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan evaluasi atas hasil survei semester I ● Menindaklanjuti hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan layanan Biro Hukum dan Organisasi, meliputi: layanan hukum, layanan organisasi dan tata laksana, dan layanan RB 	<ul style="list-style-type: none"> ● Menindaklanjuti hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan layanan Biro Hukum dan Organisasi, meliputi: layanan hukum, layanan organisasi dan tata laksana, dan layanan RB
5	Terwujudnya Tata Kelola Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi	100%	Peran dan Dukungan Biro Hukum dan Organisasi dalam penyiapan dokumen untuk mendukung optimalisasi indeks RB <i>General</i> , meliputi:				
				1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		<ul style="list-style-type: none"> ● Pengisian kertas kerja penilaian mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyusunan matriks manajemen risiko 	

				2.Zona Integritas					<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pembangunan ZI Sekretariat
				3.Nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, rencana aksi dan manual IKU JPT Pratama • Penyusunan laporan kinerja triwulanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan laporan kinerja triwulanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan laporan kinerja triwulanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan laporan kinerja triwulanan • Penyusunan draft Perjanjian Kinerja tahun 2027 	
				4. Indeks Perencanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Revisi Renja 2026 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Renja 2027 • Penyusunan TOR dan RAB 2027 			
				5. Tingkat Digitalisasi Arsip	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI 	
				6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Monev realisasi anggaran • Penyusunan RPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Monev realisasi anggaran • Penyusunan RPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Monev realisasi anggaran • Penyusunan RPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Monev realisasi anggaran • Penyusunan RPD • Implementasi LLAT 	
				7. Indeks tata Kelola Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan SIRUP 	<ul style="list-style-type: none"> • Monev pencatatan SIRUP 	<ul style="list-style-type: none"> • Monev pencatatan SIRUP 	<ul style="list-style-type: none"> • Monev pencatatan SIRUP • Pengisian SIRUP 	
				8. Indeks Sistem Merit	<ul style="list-style-type: none"> • Input data SKP target individu pada SIASN • Input realisasi SKP triwulan I 	<ul style="list-style-type: none"> • Input realisasi SKP triwulan II 	<ul style="list-style-type: none"> • Input realisasi SKP triwulan III 	<ul style="list-style-type: none"> • Input realisasi SKP triwulan IV dan tahunan • Penyusunan formasi ASN 	
				9. PEMDI/SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Input peta proses bisnis ke dalam SIA-SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> • Input penyesuaian/ pengembangan peta proses bisnis ke dalam SIA-SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> • Input penyesuaian/ pengembangan peta proses bisnis ke dalam SIA-SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> • Input penyesuaian/ pengembangan peta proses bisnis ke dalam SIA-SPBE 	
				10. Capaian Prioritas Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional triwulan I 2026 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional triwulan II 2026 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional triwulan III 2026 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional triwulan IV 2026 	
				11. Capaian IKU	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan bahan rapat pimpinan dalam rangka evaluasi dan capaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan bahan rapat pimpinan dalam rangka evaluasi dan capaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan bahan rapat pimpinan dalam rangka evaluasi dan capaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan bahan rapat pimpinan dalam rangka evaluasi dan capaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi 	
				12. Opini BPK	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan dokumen pendukung pemeriksaan keuangan BPK 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan dokumen pendukung pemeriksaan keuangan BPK 			
				13. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK		<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi hasil rekomendasi BPK 		<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi hasil rekomendasi BPK 	

				14. Survei Penilaian Integritas		• Penyampaian usulan data responden internal dan eksternal		
				15. Indeks Pengelolaan Aset	• Koordinasi data administrasi BMN	• Koordinasi data administrasi BMN	• Koordinasi data administrasi BMN	• Koordinasi data administrasi BMN

Jakarta, 30 Januari 2026
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


I Ketut Hadi Priatna *49/03/26*

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI**

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: S 1.1

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sasaran Kegiatan : **Terimplementasinya birokrasi yang berkualitas di bidang hukum dan organisasi**

Deskripsi Sasaran Kegiatan : Biro Hukum dan Organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi berbagai program kerja yang meliputi aspek Hukum dan Advokasi, Organisasi dan Tata laksana serta Reformasi Birokrasi. Dalam mengimplementasikan berbagai tugas dan tanggung jawab tersebut diperlukan koordinasi yang efektif dengan berbagai unit kerja sehingga terwujudnya tata kelola birokrasi yang berkualitas dan kolaboratif

Indikator Kinerja Utama (IKU) : **IKU 1.1 Kualitas Rencana Aksi Pembangunan RB General**

Deskripsi IKU :

Definisi
Dalam rangka perbaikan tata kelola dan penguatan perencanaan RB di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kualitas rencana aksi pembangunan RB General merupakan salah satu indeks RB yang menilai kualitas rencana aksi pembangunan RB. Sebagai upaya mendorong peningkatan nilai di setiap Indikator Kegiatan Utama (IKU) RB General yang telah ditetapkan pada PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023. Untuk mewujudkan penyusunan rencana aksi yang berkualitas, maka setiap unit kerja perlu menyusun rencana aksi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Rencana aksi pembangunan RB General ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Rencana Aksi RB. Dalam pelaksanaannya di tahun berjalan rencana aksi dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan dinamika atau kondisi yang terjadi antara lain, dinamika kebijakan nasional, program prioritas Kemenko Perekonomian, dan dalam rangka penguatan tata kelola.
Formula
Penilaian kualitas Rencana Aksi RB General Kemenko Perekonomian mengacu pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, dengan kriteria yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Kelogisan Rencana Aksi Penetapan rencana aksi memperhatikan kelogisan aksi dengan kebutuhan. Penetapan rencana aksi juga telah melalui proses analisis, termasuk memperhatikan kondisi baseline/eksisting yang direpresentasikan melalui indikator <i>immediate outcome</i>.2. Relevansi dan Kecukupan Indikator Output Penetapan indikator output pada setiap aksi perlu memenuhi kriteria relevansi dan cukup dalam menjawab aksi yang ditetapkan.3. Ketetapan Penetapan Target Indikator Output Ketepatan penetapan target pada setiap indikator output mencakup aspek kejelasan, kelayakan, dan keterukuran dari target yang ditetapkan untuk mengukur hasil atau capaian dari suatu aksi.4. Anggaran Ketersediaan anggaran yang memadai dalam mendukung pelaksanaan aksi yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan oleh Kementerian PANRB satu kali dalam setahun dengan metode penilaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tujuan
Untuk mengukur kualitas pembangunan rencana aksi RB General yang telah disusun dan direncanakan dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan.

Satuan Pengukuran	Nilai (skor)
Unit/Pihak Penyedia Data	Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Pejabat Penanggung Jawab Data	Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sumber Data	: Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.
Tingkat Kendali IKU*	<input checked="" type="checkbox"/> High <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKU**	<input type="checkbox"/> Exact <input type="checkbox"/> Proxy <input checked="" type="checkbox"/> Activity
Jenis Konsolidasi Periode	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading	<input type="checkbox"/> Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect
Polarisasi IKU	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN		2,78	2,55	N/A	2,55
s.d. Triwulan I					-
s.d. Triwulan II					-
s.d. Triwulan III					-
s.d. Triwulan IV					-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: S 1.2

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sasaran Kegiatan : Terimplementasinya birokrasi yang berkualitas di bidang hukum dan organisasi

Deskripsi Sasaran Kegiatan : Biro Hukum dan Organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi berbagai program kerja yang meliputi aspek Hukum dan Advokasi, Organisasi dan Tata laksana serta Reformasi Birokrasi. Dalam mengimplementasikan berbagai tugas dan tanggung jawab tersebut diperlukan koordinasi yang efektif dengan berbagai unit kerja sehingga terwujudnya tata kelola birokrasi yang berkualitas dan kolaboratif

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU 1.2 Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General

Deskripsi IKU :

Definisi
Dalam rangka perbaikan tata kelola dan penguatan pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General merupakan salah satu indeks RB yang menilai pelaksanaan rencana aksi pembangunan RB. Sebagai upaya mendorong peningkatan nilai di setiap Indikator Kegiatan Utama (IKU) RB General yang telah ditetapkan pada peraturan Menteri PANRB. Untuk mewujudkan pelaksanaan rencana aksi RB General yang berkualitas.
Formula
Tingkat Pemenuhan Implementasi Rencana Aksi RB General Kemenko Perekonomian diukur dengan formula sebagai berikut: $\% \text{ Implementasi Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total Renaksi RB yang direncanakan}} \times 100\%$
Tujuan
Untuk mengukur implementasi rencana aksi RB General dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana yang telah direncanakan.

Satuan Pengukuran : Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data : Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pejabat Penanggung Jawab Data : Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sumber Data : Sistem Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (SIMERSI)

Tingkat Kendali IKU* : (.....) High (.....) Moderate (X) Low

Tingkat Validitas IKU**

(...) Exact (.....) Proxy (X) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(X) Sum (.....) Average (.....) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

: (X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize

Periode Pelaporan

: (....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (.....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	90	100	100%	N/A	100%
s.d. Triwulan I					25%
s.d. Triwulan II					50%
s.d. Triwulan III					75%
s.d. Triwulan IV					100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: S 1.3

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sasaran Kegiatan : Terimplementasinya birokrasi yang berkualitas di bidang hukum dan organisasi

Deskripsi Sasaran Kegiatan : Biro Hukum dan Organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi berbagai program kerja yang meliputi aspek Hukum dan Advokasi, Organisasi dan Tata laksana serta Reformasi Birokrasi. Dalam mengimplementasikan berbagai tugas dan tanggung jawab tersebut diperlukan koordinasi yang efektif dengan berbagai unit kerja sehingga terwujudnya tata kelola birokrasi yang berkualitas dan kolaboratif

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU 1.3 Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi

Deskripsi IKU

Definisi

Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah persentase hasil proses pengalihan unit organisasi Jabatan Administrasi menjadi jabatan fungsional, sehingga struktur organisasi hanya menyisakan 2 (dua) tingkatan unit organisasi, kecuali untuk unit kerja/jabatan tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional seperti urusan rumah tangga, urusan protokol dan tata usaha Pimpinan, urusan persidangan, serta urusan lintas disiplin ilmu. Berdasarkan SE 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

Formula

Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) dihitung dari persentase rata-rata penilaian persentase pengalihan struktur organisasi eselon III dan IV terhadap struktur eselon III dan IV yang potensi untuk bisa dialihkan dan penilaian evaluasi kelembagaan sesuai surat edaran Menteri PANRB nomor 15 tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Tata cara penghitungan persentase penyederhanaan struktur organisasi dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$PSO = \frac{A - B}{A - C} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah struktur jabatan administrasi sebelum penyederhanaan

B = Jumlah struktur jabatan administrasi setelah penyederhanaan

C = Jumlah struktur jabatan administrasi yang berpotensi dipertahankan

Tujuan

Untuk mengetahui nilai/gambaran pengurangan tingkatan unit organisasi sebagai pelaksanaan agenda reformasi birokrasi menuju organisasi yang *agile*, profesional dan kolaboratif.

Satuan Pengukuran : Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data : Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pejabat Penanggung Jawab Data	Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sumber Data	: Penilaian mandiri untuk penyederhanaan struktur organisasi Kemenko Perekonomian
Tingkat Kendali IKU*	(.....) High (X) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU**	(...) Exact (X) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(....) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (X) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	: (X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	: (...) Bulanan (..) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	100	100	100%
s.d. Triwulan I					
s.d. Triwulan II					
s.d. Triwulan III					
s.d. Triwulan IV					

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: S 1.4

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sasaran Kegiatan : Terimplementasinya birokrasi yang berkualitas di bidang hukum dan organisasi

Deskripsi Sasaran Kegiatan : Biro Hukum dan Organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi berbagai program kerja yang meliputi aspek Hukum dan Advokasi, Organisasi dan Tata laksana serta Reformasi Birokrasi. Dalam mengimplementasikan berbagai tugas dan tanggung jawab tersebut diperlukan koordinasi yang efektif dengan berbagai unit kerja sehingga terwujudnya tata kelola birokrasi yang berkualitas dan kolaboratif

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU 1.4 Tingkat Capaian Sistem Kerja

Deskripsi IKU

Definisi

Kebijakan sistem kerja pasca penyederhanaan organisasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 membawa konsekuensi penyesuaian sistem kerja dari pola kerja hierarki, tradisional, serta bersifat terkotak-kotak menjadi sistem kerja yang bersifat *agile*, profesional, fleksibel dan dinamis dalam setiap unit kerja/organisasi.

Tingkat capaian sistem kerja adalah sejauh mana implementasi sistem kerja pasca penyederhanaan organisasi dalam rangka menuju sistem kerja yang bersifat *agile*, profesional, fleksibel dan dinamis dalam setiap unit kerja/organisasi yang dilaksanakan oleh Kemenko Perekonomian berdasarkan PermenPANRB 7/2022 dan SE MenPANRB 15/2023.

Formula

Metode pengukuran tingkat capaian kebijakan sistem kerja pasca penyederhanaan struktur organisasi mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB No. 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Terdapat 5 kategori penilaian, untuk nilai maksimal K/L harus mencapai kategori 1 dengan nilai 5 (interval 80% s.d. 100%). Adapun kriteria capaian yang harus terpenuhi adalah:

1. Telah menetapkan kebijakan sistem kerja, termasuk pedoman penyusunan
2. Menerapkan *squad team*
3. Melakukan penyesuaian dan/atau pengembangan proses bisnis/SOP.

Rincian perhitungan penilaian:

1. Penetapan kebijakan sistem kerja (30%):
 - a. Peta proses bisnis (10%)
 - b. Mekanisme kerja (10%)
 - c. Pedoman penyusunan SOP (5%)
 - d. Pedoman penyusunan kelompok kerja (5%)
2. Pembentukan kelompok kerja (35%):
 - a. Tersedia SK Kelompok Kerja yang sesuai dengan substansi tugas dan fungsi unit kerja (25%)
 - b. Kesesuaian dengan PK JPT Pratama (5%)
 - c. Menggambarkan aspek kolaborasi (5%)
3. Melakukan evaluasi dan pengembangan SOP (bobot 35%)

Tujuan

Untuk mengukur tingkat capaian penerapan kebijakan sistem kerja pasca penyederhanaan organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara efektif.

Satuan Pengukuran	Nilai
Unit/Pihak Penyedia Data	Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Pejabat Penanggung Jawab Data	Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sumber Data	: Laporan Penilaian Mandiri Penyesuaian Sistem Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Tingkat Kendali IKU*	(...) High (X) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU**	(...) Exact (X) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(...) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (X) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	: (X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	: (...) Bulanan (...) Triwulanan (...) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	95%	99,75%	5	5	5
s.d. Triwulan I					
s.d. Triwulan II					
s.d. Triwulan III					
s.d. Triwulan IV					

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: S 1.5

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sasaran Kegiatan : Terimplementasinya birokrasi yang berkualitas di bidang hukum dan organisasi

Deskripsi Sasaran Kegiatan : Biro Hukum dan Organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi berbagai program kerja yang meliputi aspek Hukum dan Advokasi, Organisasi dan Tata laksana serta Reformasi Birokrasi. Dalam mengimplementasikan berbagai tugas dan tanggung jawab tersebut diperlukan koordinasi yang efektif dengan berbagai unit kerja sehingga terwujudnya tata kelola birokrasi yang berkualitas dan kolaboratif

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU.1.5 Indeks Reformasi Hukum

Deskripsi IKU :

Definisi
Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur pelaksanaan reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan, serta penguatan sistem regulasi nasional, yang hasil penilaiannya atau pengukuran dalam bentuk skor (nilai).
Formula
Penilaian indeks reformasi hukum dilakukan oleh Kementerian Hukum satu kali dalam setahun dengan metode penilaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Tujuan
Untuk mengidentifikasi bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun dan melaksanakan regulasi yang tepat guna dan tepat sasaran, serta tidak berbenturan dengan regulasi yang lebih tinggi kedudukannya.

Satuan Pengukuran : Nilai

Unit/Pihak Penyedia Data : Kementerian Hukum

Pejabat Penanggung Jawab Data : Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sumber Data : Laporan Penilaian dari Kementerian Hukum

Tingkat Kendali IKU* : (X) High

(...) Moderate

(...) Low

Tingkat Validitas IKU** : (...) Exact

		(...) Proxy	(X) Activity
Jenis Konsolidasi Periode		(...) Sum	
		(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU		(...) Cascading Peta	
		(X) Cascading Non Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading		(...) Direct	
		(X) Indirect	
Polarisasi IKU	:	(X) Maximize	
		(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	:	(...) Bulanan	
		(...) Triwulanan	(...) Semesteran
			(X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	80	96,98	90	98,10	90
s.d. Triwulan I					-
s.d. Triwulan II					-
s.d. Triwulan III					-
s.d. Triwulan IV					-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: S 2.1

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sasaran Kegiatan : **Terwujudnya Dukungan Koordinasi Cipta Kerja yang Efektif**

Deskripsi Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendorong penyelenggaraan Cipta Kerja yang berimplikasi positif bagi perekonomian nasional, meliputi Undang-Undang Cipta Kerja beserta seluruh regulasi turunannya, serta Advokasi *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan turunannya

Indikator Kinerja Utama (IKU) : **IKU 2.1 Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut terkait Undang-Undang Cipta Kerja**

Deskripsi IKU

Definisi

Persentase dukungan penyelesaian tindak lanjut terkait Undang-Undang Cipta Kerja adalah dukungan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian setiap peraturan turunan yang diamanatkan untuk dibentuk oleh Undang-Undang Cipta Kerja termasuk perubahan terhadap peraturan turunan eksisting (selain Permen/Peraturan Badan), dan penanganan perkara pengujian.

Bentuk dukungan penyelesaian dimaksud adalah koordinasi terkait pembentukan produk hukum (UUCK) dan penanganan perkara pengujian tersebut diatas, baik yang melibatkan instansi eksternal maupun unit kerja internal, meliputi:

1. Permohonan izin prakarsa oleh Menko Perekonomian;
2. Pembentukan panitia antar Kementerian dan/atau antar nonkementerian (PAK);
3. Pelaksanaan rapat PAK penyusunan rancangan PUU;
4. Penandatanganan berita acara PAK penyusun rancangan PUU;
5. Permohonan Harmonisasi kepada Kementerian Hukum;
6. Penandatanganan Berita Acara Pengharmonisasian;
7. Permohonan penetapan rancangan PUU kepada Presiden;
8. Pemberian Paraf atau masukan terhadap rancangan PUU;
9. Penetapan surat kuasa khusus dan/atau surat kuasa substitusi;
10. Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait;
11. Penanganan perkara di pengadilan;
12. Penyusunan dokumen penanganan perkara (jawaban Pemerintah/keterangan Presiden/alat bukti);
13. Fasilitasi saksi dan ahli yang dibutuhkan

Formula

Jumlah peraturan turunan (selain Permen/Peraturan Badan), perubahan peraturan turunan eksisting, dan penanganan pengujian yang telah difasilitasi (a) dibagi total peraturan turunan dan penanganan pengujian yang harus difasilitasi (b), dikali 100% (c)

$$x = a/b.c$$

Catatan:

x = capaian IKU

b = total peraturan yang diprakarsai oleh Kemenko Perekonomian ditambah dengan permohonan dukungan penyelesaian terkait tindak lanjut terkait UUCK dari K/L dan jumlah penanganan pengujian yang harus difasilitasi. Jumlah ini tidak dapat ditentukan di awal tahun (dapat berubah jumlahnya sewaktu-waktu di tahun berjalan).

Tujuan

Untuk mengetahui peran Kemenko Perekonomian dalam penyelesaian tindak lanjut terkait Undang-Undang Cipta Kerja, baik penyusunan peraturan turunan (selain Permen/Peraturan Badan) maupun penanganan perkara pengujian.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pejabat Penanggung Jawab Data

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sumber Data

: Biro Hukum dan Organisasi

Tingkat Kendali IKU*

High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU**

Exact Proxy Activity

Jenis Konsolidasi Periode

Sum Average Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

Cascading Peta Cascading Non Peta Non-Cascading

Metode Cascading

Direct Indirect

Polarisasi IKU

: Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan

: Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN					100%
s.d. Triwulan I					25%
s.d. Triwulan II					50%
s.d. Triwulan III					75%
s.d. Triwulan IV					100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

KODE IKU: S 3.1

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sasaran Strategis : **Terwujudnya Penelaahan dan Perumusan Hukum serta Analisis Organisasi dan Tata Laksana yang Berkualitas**

Deskripsi Sasaran Strategis : Biro Hukum dan Organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi berbagai program kerja yang meliputi aspek Hukum dan Advokasi, Organisasi dan Tata laksana serta Reformasi Birokrasi. Dalam mengimplementasikan berbagai tugas dan tanggung jawab tersebut diperlukan koordinasi yang efektif dengan berbagai unit kerja sehingga dibutuhkan tata kelola birokrasi yang berkualitas dan kolaboratif

Indikator Kinerja Utama (IKU) : **IKU 3.1 Persentase penyelesaian dokumen perumusan produk hukum**

Deskripsi IKU :

Definisi

Persentase penyelesaian dokumen perumusan produk hukum adalah penyelesaian proses penyusunan dokumen administratif yang dipersyaratkan dalam pembentukan suatu produk hukum. Koordinasi penyelesaian dokumen dimaksud melibatkan instansi eksternal maupun unit kerja internal dan meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Permohonan izin prakarsa oleh Menko Perekonomian;
 - Terkirimnya surat Izin Prakarsa dari Menko Perekonomian kepada Mensesneg
2. Pembentukan panitia antar Kementerian dan/atau antar nonkementerian (PAK);
 - Ditetapkannya Kepmenko PAK
3. Pelaksanaan rapat PAK penyusunan rancangan PUU;
 - Terlaksananya Rapat PAK
4. Penandatanganan berita acara PAK penyusun rancangan PUU;
 - Tersedianya Berita Acara yang telah ditandatangani
5. Permohonan Harmonisasi kepada Kementerian Hukum;
 - Tersedianya surat harmonisasi dari Kemenko Perekonomian kepada Kementerian Hukum
6. Penandatanganan Berita Acara Pengharmonisasian;
 - Tersedianya Berita Acara Harmonisasi
7. Permohonan penetapan rancangan PUU kepada Presiden;
 - Tersedianya surat penetapan rancangan PUU kepada Presiden
8. Pemberian Paraf atau masukan terhadap rancangan PUU;
 - Tersedianya paraf persetujuan Menko Perekonomian atas rancangan PUU

Formula

Jumlah dokumen administratif yang diselesaikan (a) dibagi dengan jumlah dokumen yang harus diselesaikan (b) dikali 100% (c)

$$x = a/b.c$$

Catatan:

x = capaian IKU

b = total dokumen administratif perumusan produk hukum yang harus diselesaikan, meliputi: Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Instruksi Presiden, Rancangan Peraturan Menko Perekonomian, Rancangan Peraturan Sekretaris Kementerian, Rancangan Keputusan Menko Perekonomian, Rancangan Keputusan Eselon I dan/atau pejabat yang berwenang lainnya, Perjanjian hingga Surat Edaran (dokumen dimaksud bersifat insidental sehingga jumlahnya dapat berubah sewaktu-waktu di tahun berjalan).

Tujuan

Untuk mengetahui peran Biro Hukum dan Organisasi dalam upaya menyelesaikan seluruh produk hukum yang dibutuhkan oleh *stakeholders* baik di internal maupun eksternal Kemenko Perekonomian

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pejabat Penanggung Jawab Data

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sumber Data

:

Biro Hukum dan Organisasi, unit kerja terkait, dan kementerian/lembaga

Tingkat Kendali IKU*

(...) High

(...) Moderate

(X) Low

Tingkat Validitas IKU**

(...) Exact

(X) Proxy

(...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(X) Sum

(...) Average

(...) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(...) Cascading Peta

(...) Cascading Non Peta

(X) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct

(X) Indirect

Polarisasi IKU

:

(X) Maximize

(...) Minimize

(...) Stabilize

Periode Pelaporan

:

(...) Bulanan

(X) Triwulanan

(...) Semesteran

(...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN					100%
s.d. Triwulan I					25%
s.d. Triwulan II					50%
s.d. Triwulan III					75%
s.d. Triwulan IV					100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: S 3.2

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sasaran Kegiatan : **Terwujudnya Penelaahan dan Perumusan Hukum serta Analisis Organisasi dan Tata Laksana yang Berkualitas**

Deskripsi Sasaran Kegiatan : Biro Hukum dan Organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi berbagai program kerja yang meliputi aspek Hukum dan Advokasi, Organisasi dan Tata laksana serta Reformasi Birokrasi. Dalam mengimplementasikan berbagai tugas dan tanggung jawab tersebut diperlukan koordinasi yang efektif dengan berbagai unit kerja sehingga dibutuhkan tata kelola birokrasi yang berkualitas dan kolaboratif

Indikator Kinerja Utama (IKU) : **IKU 3.2 Persentase penyelesaian dokumen advokasi hukum**

Deskripsi IKU :

Definisi
<p>Persentase penanganan perkara yang melibatkan Kemenko Perekonomian sebagai pihak dalam perkara. Dalam penanganan perkara dimaksud meliputi bentuk perkara pada tahun sebelumnya (n-1) yang ditangani oleh unit kerja Biro HO dan akan dilanjutkan proses penanganannya di tahun berjalan. Adapun tahapan penanganan perkara dimaksud meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penetapan Surat Kuasa Khusus dan/atau Surat Kuasa Substitusi;<ul style="list-style-type: none">- Tersedianya surat kuasa khusus dan atau surat kuasa substitusi yang telah ditandatangani oleh Pejabat/Pegawai lingkungan Kemenko Perekonomian2. Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait:<ul style="list-style-type: none">- Terlaksananya rapat koordinasi antar kementerian/lembaga3. Penanganan perkara di pengadilan;<ul style="list-style-type: none">- Terlaksananya pendampingan persidangan4. Penyusunan dokumen penanganan perkara (Jawaban Pemerintah/Keterangan Presiden/Alat Bukti);<ul style="list-style-type: none">- Tersedianya dokumen penanganan perkara (jawaban Pemerintah/Keterangan Presiden/Alat Bukti).5. Fasilitasi saksi dan ahli yang dibutuhkan.<ul style="list-style-type: none">- Tersedianya saksi dan ahli yang dibutuhkan. <p>Catatan: <i>Carry Over</i> = Perkara n-1 yang ditangani tahun berjalan n= tahun berjalan n-1= tahun sebelumnya</p>
Formula
<p>Jumlah dukungan penanganan perkara yang melibatkan Kemenko Perekonomian (a) dibagi dengan jumlah tahapan perkara yang ditangani oleh Kemenko Perekonomian (b) dikali 100% (c)</p> $x = \frac{a}{b} \cdot c$ <p>Catatan: x = capaian IKU b = total jumlah tahapan perkara yang ditangani pada tahun berjalan (tahapan perkara dimaksud bersifat dinamis mengikuti perkembangan perkara sehingga jumlahnya dapat berubah sewaktu-waktu di tahun berjalan).</p>
Tujuan
<p>Untuk mengetahui peran Biro Hukum dan Organisasi dalam upaya penyelesaian perkara yang melibatkan Kemenko Perekonomian</p>

Satuan Pengukuran :

Unit/Pihak Penyedia Data :

Pejabat Penanggung Jawab Data :

Sumber Data :

Tingkat Kendali IKU* :

Tingkat Validitas IKU** :

Jenis Konsolidasi Periode :

Jenis Cascading IKU :

Metode Cascading :

Polarisasi IKU :

Periode Pelaporan :

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN					100%
s.d. Triwulan I					25%
s.d. Triwulan II					50%
s.d. Triwulan III					75%
s.d. Triwulan IV					100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: S 3.3

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sasaran Kegiatan : **Terwujudnya Penelaahan dan Perumusan Hukum serta Analisis Organisasi dan Tata Laksana yang Berkualitas**

Deskripsi Sasaran Kegiatan : Biro Hukum dan Organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi berbagai program kerja yang meliputi aspek Hukum dan Advokasi, Organisasi dan Tata laksana serta Reformasi Birokrasi. Dalam mengimplementasikan berbagai tugas dan tanggung jawab tersebut diperlukan koordinasi yang efektif dengan berbagai unit kerja sehingga dibutuhkan tata kelola birokrasi yang berkualitas dan kolaboratif

Indikator Kinerja Utama (IKU) : **IKU 3.3 Persentase penyelesaian instrumen penataan organisasi**

Deskripsi IKU

Definisi

Persentase Penyelesaian Instrumen Penataan Organisasi adalah penyelesaian penyusunan dan evaluasi instrumen yang diperlukan dan menjadi kewajiban dalam penataan organisasi dan perencanaan kebutuhan, meliputi :

- Penataan struktur organisasi yang tepat fungsi (Perpres 143/2024 dan perubahannya; Perpres 12/2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029; dan Permenko Perekonomian 17/2025 tentang Renstra Kemenko Perekonomian)
- Evaluasi analisis jabatan dan analisis beban kerja (PermenPANRB 1/2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan Perka BKN 9/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan ASN)
- Evaluasi kebutuhan pegawai :
 - perencanaan kebutuhan jabatan fungsional (PermenPANRB 1/2023 tentang Jabatan Fungsional)
 - perencanaan kebutuhan jabatan pelaksana (PermenPANRB 45/2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan KepmenPANRB 282/2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah)
 - penyusunan dan penyesuaian peta jabatan (PermenPANRB 1/2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja & PermenPANRB 34/2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan)
- Evaluasi jabatan (PermenPANRB 34/2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan)
- Evaluasi standar kompetensi jabatan (PermenPANRB 38/2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN)

Formula

Membandingkan jumlah dokumen instrumen penataan organisasi yang menjadi kewajiban Tahun 2026 dengan yang diselesaikan, yaitu sejumlah 5 dokumen, meliputi:

- Penataan struktur organisasi yang tepat fungsi sejumlah 1 dokumen (20%)
- Monitoring dan evaluasi analisis jabatan dan analisis beban kerja sejumlah 1 dokumen (20%)
- Perencanaan kebutuhan pegawai sejumlah 1 paket dokumen (20%):
 - perencanaan kebutuhan jabatan fungsional
 - perencanaan kebutuhan jabatan pelaksana
 - penyusunan dan penyesuaian peta jabatan
- Evaluasi jabatan sejumlah 1 dokumen (20%)
- Evaluasi standar kompetensi jabatan sejumlah 1 dokumen (20%)

dengan seluruh target instrumen penataan organisasi total sebanyak 100%.

Dasar pembobotan masing-masing kelompok penyelesaian dokumen diperoleh dari nilai total keseluruhan dokumen (100%) dibagi dengan lima (5) kelompok utama penyelesaian dokumen evaluasi instrumen penataan organisasi sehingga diperoleh bobot 20%.

Kriteria nilai bobot pada masing-masing penyelesaian dokumen adalah:

- Penataan struktur organisasi yang tepat fungsi, bobot 20% apabila menghasilkan bahan/materi/dokumen penyesuaian susunan organisasi meliputi: materi/bahan analisis, konsep naskah urgensi, dan Rancangan Peraturan (perubahan Perpres 143/2024 dan perubahan Permenko 15/2024 tentang struktur organisasi)
- Monitoring dan evaluasi analisis jabatan dan analisis beban kerja, bobot 20% apabila menghasilkan laporan hasil monev dan rekomendasi perbaikan Anjab-ABK.
- Evaluasi kebutuhan pegawai, bobot 20% apabila menghasilkan dokumen:
 - dokumen usulan penyesuaian formasi jabatan fungsional
 - dokumen analisis formasi jabatan pelaksana berdasarkan PermenPANRB 45/2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
 - rancangan kepmenko perekonomian tentang peta jabatan
- Evaluasi jabatan, bobot 20% apabila menghasilkan laporan monitoring dan evaluasi serta analisis faktor-faktor jabatan.
- Evaluasi standar kompetensi jabatan, bobot 20% apabila menghasilkan dokumen rancangan Kepmenko Perekonomian tentang standar kompetensi jabatan

Tujuan

Untuk menghasilkan dokumen evaluasi dan penyusunan instrumen penataan organisasi dan perencanaan kebutuhan yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pejabat Penanggung Jawab Data

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sumber Data

: Penghitungan secara mandiri oleh Biro Hukum dan Organisasi

Tingkat Kendali IKU*

(...) High (X) Moderate (...) Low

Tingkat Validitas IKU**

(...) Exact (X) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(...) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (X) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

: (X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

: (...) Bulanan (X) Triwulanan (...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	95%	100%	100%	100%	100%
s.d Triwulan I					25%
s.d Triwulan II					50%
s.d Triwulan III					75%
s.d Triwulan IV					100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: S 3.4

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Penelaahan dan Perumusan Hukum serta Analisis Organisasi dan Tata Laksana yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan : Biro Hukum dan Organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi berbagai program kerja yang meliputi aspek Hukum dan Advokasi, Organisasi dan Tata laksana serta Reformasi Birokrasi. Dalam mengimplementasikan berbagai tugas dan tanggung jawab tersebut diperlukan koordinasi yang efektif dengan berbagai unit kerja sehingga dibutuhkan tata kelola birokrasi yang berkualitas dan kolaboratif

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU 3.4 Persentase penyelesaian instrumen penataan tata laksana

Deskripsi IKU

Definisi

Persentase Penyelesaian Instrumen Penataan Tata Laksana adalah penyelesaian penyusunan dan evaluasi instrumen yang diperlukan dan menjadi kewajiban dalam penataan tata laksana, meliputi:

1. Kebijakan sistem kerja (1 paket dokumen), yaitu: Peta Proses Bisnis Kemenko Perekonomian Tahun 2026 dan Pedoman, Buku Saku Penyusunan SK Pokja;
2. Pembentukan kelompok kerja (1 paket dokumen), yaitu: Keputusan setiap Pimpinan unit kerja JPT Pratama (35 unit kerja);
3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan SOP (1 paket dokumen), yaitu: Laporan evaluasi SOP dan dokumen SOP yang dikembangkan pada unit kerja.

Formula

Membandingkan jumlah dokumen instrumen penataan tata laksana yang menjadi kewajiban Tahun 2026 dengan yang diselesaikan, yaitu sejumlah 3 paket dokumen, meliputi:

1. Penetapan kebijakan sistem kerja (35%), yaitu: draf Kepmenko tentang Peta Proses Bisnis dan Buku Saku Penyusunan SK Pokja.
2. Pembentukan kelompok kerja (35%), yaitu: 35 paket dokumen SK Pokja pada seluruh unit kerja JPT Pratama.
3. Laporan evaluasi dan dokumen SOP yang dikembangkan (bobot 30%), yaitu: Laporan evaluasi triwulanan dan SOP yang dikembangkan pada setiap unit kerja yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat Eselon I masing-masing.

dengan seluruh target instrumen penataan tata laksana total sebanyak 100%.

Tujuan

Untuk menghasilkan dokumen evaluasi dan penyusunan instrumen penataan tata laksana yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pejabat Penanggung Jawab Data

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sumber Data : Penghitungan mandiri oleh Biro Hukum dan Organisasi

Tingkat Kendali IKU* () High () Moderate () Low

Tingkat Validitas IKU** () Exact () Proxy () Activity

Jenis Konsolidasi Periode () Sum () Average () Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU () Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non-Cascading

Metode Cascading () Direct () Indirect

Polarisasi IKU : () Maximize () Minimize () Stabilize

Periode Pelaporan : () Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	2 Paket Dokumen	100%	39 Dokumen	100%	100%
s.d. Triwulan I	1 Paket Dokumen	75%	36 Dokumen	92%	35%
s.d. Triwulan II	1 Paket Dokumen	100%	1 Paket Dokumen	94%	65%
s.d. Triwulan III			N/A	N/A	85%
s.d. Triwulan IV			2 Paket Dokumen	100%	100%

Tingkat Validitas IKU**	<input type="checkbox"/> Exact <input type="checkbox"/> Proxy <input checked="" type="checkbox"/> Activity		
Jenis Konsolidasi Periode	<input checked="" type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Take Last Known Value		
Jenis Cascading IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading		
Metode Cascading	<input checked="" type="checkbox"/> Direct <input type="checkbox"/> Indirect		
Polarisasi IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize		
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan		

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN					100%
s.d. Triwulan I					25%
s.d. Triwulan II					50%
s.d. Triwulan III					75%
s.d. Triwulan IV					100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: S 3.6

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Penelaahan dan Perumusan Hukum serta Analisis Organisasi dan Tata Laksana yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan : Biro Hukum dan Organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi berbagai program kerja yang meliputi aspek Hukum dan Advokasi, Organisasi dan Tata laksana serta Reformasi Birokrasi. Dalam mengimplementasikan berbagai tugas dan tanggung jawab tersebut diperlukan koordinasi yang efektif dengan berbagai unit kerja sehingga dibutuhkan tata kelola birokrasi yang berkualitas dan kolaboratif

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU 3.6 Persentase penyelesaian dokumen RB *General*

Deskripsi IKU

Definisi

Persentase penyelesaian dokumen RB *General* merupakan indikator kuantitatif yang mencerminkan tingkat pencapaian implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi *General* yang telah ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Capaian ini dibuktikan melalui unggahan dokumen secara berkala ke dalam sistem monitoring dan evaluasi. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dibandingkan dengan total dokumen yang direncanakan dalam periode tertentu, guna mengukur sejauh mana target penyelesaian telah tercapai.

Formula

Tingkat Persentase penyelesaian dokumen RB *General* Kemenko Perekonomian diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Penyelesaian dokumen RB General} = \frac{\text{Total Dokumen RB General yang diunggah}}{\text{Total Dokumen RB General yang direncanakan}} \times 100\%$$

Tujuan

Mengukur tingkat keterlaksanaan dan akuntabilitas implementasi Reformasi Birokrasi *General* melalui pemantauan penyelesaian dokumen secara berkala, guna memastikan bahwa seluruh rencana aksi telah dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan.

Satuan Pengukuran : Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data : Biro Hukum dan Organisasi

Pejabat Penanggung Jawab Data : Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sumber Data : Sistem Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (SIMERSI)

Tingkat Kendali IKU* : (...) High (...) Moderate (X) Low

Tingkat Validitas IKU**	<input type="checkbox"/> Exact <input type="checkbox"/> Proxy <input checked="" type="checkbox"/> Activity		
Jenis Konsolidasi Periode	<input checked="" type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Take Last Known Value		
Jenis Cascading IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading		
Metode Cascading	<input checked="" type="checkbox"/> Direct <input type="checkbox"/> Indirect		
Polarisasi IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize		
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan		

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN					100%
s.d. Triwulan I					25%
s.d. Triwulan II					50%
s.d. Triwulan III					75%
s.d. Triwulan IV					100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: S 4.1

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sasaran Kegiatan : **Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi dalam dukungan Manajemen yang Berkualitas**

Deskripsi Sasaran Kegiatan : Biro Hukum dan Organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi berbagai program kerja yang meliputi aspek Hukum dan Advokasi, Organisasi dan Tata laksana serta Reformasi Birokrasi. Dalam mengimplementasikan berbagai tugas dan tanggung jawab tersebut diperlukan koordinasi yang efektif dengan berbagai unit kerja sehingga dibutuhkan tata kelola birokrasi yang berkualitas dan kolaboratif

Indikator Kinerja Utama (IKU) : **IKU 4.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi**

Deskripsi IKU : **Definisi**

Indikator kepuasan layanan Biro Hukum dan Organisasi mengukur tentang tingkat kepuasan layanan koordinasi dan dukungan yang diberikan oleh Biro Hukum dan Organisasi.

Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu :

- 1. Aspek Ketanggapan dalam layanan (*Responsive*);**
Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan atau kebutuhan layanan.
- 2. Aspek Keandalan dalam layanan (*Reliable*);**
Mengukur sejauh mana layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur atau standar layanan.
- 3. Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (*Tangible*);**
Menilai ketersediaan dan kualitas fisik/fasilitas, serta tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan.
- 4. Aspek Kepastian dalam Layanan (*Assured*);**
Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta tingkat kepercayaan dan rasa aman.
- 5. Aspek Sikap dalam Layanan (*Empathetic*)**
Menunjukkan perhatian dan kepedulian secara personal dan manusiawi pada layanan yang diberikan.

Seluruh aspek kepuasan ini dirata – rata dan diukur ke dalam indeks kepuasan layanan yang terdiri dari 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

1. Sangat Tidak Puas
2. Tidak Puas
3. Puas
4. Sangat Puas

Formula

Indikator Kinerja Utama Indeks kepuasan layanan Biro Hukum dan Organisasi diukur melalui Survey Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diluar Biro Hukum dan Organisasi. Daftar pertanyaan survey terdiri dari beberapa pertanyaan berupa 5 (lima) jenis aspek layanan yang telah diberikan oleh Biro Hukum dan Organisasi kepada Deput dan unit kerja lainnya. Jumlah responden dipilih secara acak/random dan berasal dari unit Kerja di Lingkungan Kemenko Perekonomian, diluar unit Biro Hukum dan Organisasi

Rumus Perhitungan :

$$\frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing – masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Nilai Indeks diperoleh berdasarkan nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4

B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
 C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
 D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Terdapat 3 (tiga) kelompok substansi layanan yang menjadi sasaran penilaian, meliputi: Layanan hukum, layanan organisasi dan tata laksana serta layanan pengelolaan reformasi birokrasi, yang selanjutnya akan diakumulasikan dan dirata-ratakan, sehingga menjadi nilai layanan Biro Hukum dan Organisasi

Tujuan

Memberikan gambaran tingkat kepuasan terhadap layanan Biro Hukum dan Organisasi dan dukungan administrasi Kegiatan dan Tata Kelola di lingkungan Kemenko Perekonomian

Satuan Pengukuran

Indeks

Unit/Pihak Penyedia Data

Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Pejabat Penanggung Jawab Data

Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Sumber Data

: Laporan hasil survei indeks kepuasan layanan Sekretariat (Biro Hukum dan Organisasi)

Tingkat Kendali IKU*

(...) High (X) Moderate (...) Low

Tingkat Validitas IKU**

(X) Exact (...) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(..) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

: (X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

: (...) Bulanan (...) Triwulanan (X) Semesteran (..) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
Semester I					3 dari 4
Semester II					3 dari 4

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: S 5.1

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sasaran Kegiatan : **Terwujudnya Tata Kelola Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik**

Deskripsi Sasaran Kegiatan : Biro Hukum dan Organisasi berupaya menciptakan sebuah sistem tata kelola yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tata kelola yang baik mencakup penyusunan regulasi yang berkualitas, penataan organisasi yang adaptif terhadap dinamika kebijakan, pelaksanaan reformasi birokrasi yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta pelayanan hukum dan kelembagaan yang responsif terhadap kebutuhan kementerian dan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : **IKU 5.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi**

Deskripsi IKU

Definisi

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi menunjukkan ukuran pelaksanaan RB General yang dikontribusikan oleh Biro Hukum dan Organisasi terhadap indikator RB General yang dikoordinasikan oleh unit kerja lain di lingkungan Kemenko Perekonomian.

Pada tahun 2026, Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan dukungan terhadap indikator Reformasi Birokrasi lainnya diluar Indeks Reformasi Birokrasi yang diampu oleh Biro Hukum dan Organisasi yang meliputi:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2. Zona Integritas
3. Nilai SAKIP
4. Indeks Perencanaan Pembangunan
5. Tingkat Digitalisasi Arsip
6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
7. Indeks Tata Kelola Pengadaan
8. Indeks Sistem Merit
9. PEMDI/SPBE
10. Capaian Prioritas Nasional
11. Capaian IKU
12. Opini BPK
13. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
14. Survei Penilaian Integritas
15. Indeks Pengelolaan Aset

Indikator tersebut dapat berubah sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditetapkan pada tahun 2026

Formula

Tingkat persentase pelaksanaan reformasi birokrasi Biro Hukum dan Organisasi diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Pelaksanaan RB Biro HO} = \frac{15 \text{ dokumen dukungan RB General yang terlaksana}}{15 \text{ dokumen RB General}} \times 100\%$$

Tujuan

Untuk mengetahui peran Biro Hukum dan Organisasi dalam mendukung pencapaian indikator kegiatan utama RB General yang dikoordinasikan oleh unit kerja lain di lingkungan Kemenko Perekonomian.

Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Biro Hukum dan Organisasi		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Kepala Biro Hukum dan Organisasi		
Sumber Data	: Dokumen Internal RB Biro Hukum dan Organisasi		
Tingkat Kendali IKU*	<input checked="" type="checkbox"/> High	<input type="checkbox"/> Moderate	<input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKU**	<input type="checkbox"/> Exact	<input type="checkbox"/> Proxy	<input checked="" type="checkbox"/> Activity
Jenis Konsolidasi Periode	<input checked="" type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input type="checkbox"/> Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	<input type="checkbox"/> Cascading Peta	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading	<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Indirect	
Polarisasi IKU	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize		
Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan		

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN					100%
s.d. Triwulan I					25%
s.d. Triwulan II					50%
s.d. Triwulan III					75%
s.d. Triwulan IV					100%

Jakarta, 30 Januari 2026
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


I Ktut Hadi Priatna *1-01-2026*